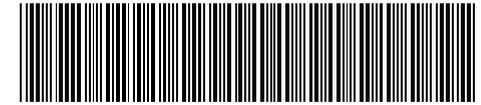




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693131/2025**



DS:7348-9489-6606-0607

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**Revisi ke 01**

Tanggal : 21 Februari 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (693131) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 391.918.000 ( TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen  
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 391.918.000  
Rp. 391.918.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	391.918.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 391.918.000

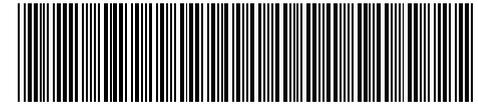
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
SUAHASIL NAZARA  
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693131) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			391.918.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			391.918.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	382.869.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	4.00	Rekomendasi Kebijakan	382.869.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	23,00	orang	9.049.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	23.00	orang	9.049.000

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
 Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
 Kode>Nama Satker : (693131) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	391.918.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	391.918.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693131) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693131	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	-	391.918	-	-	-	391.918		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	391.918	-	-	-	391.918		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	391.918	-	-	-	391.918		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	382.869	-	-	-	382.869	19 . 51	
01	RM	-	382.869	-	-	-	382.869	136@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	9.049	-	-	-	9.049	19 . 51	
01	RM	-	9.049	-	-	-	9.049	136@	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>391.918</b>	-	-	-	<b>391.918</b>		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN  
Kode>Nama Satker : (693131) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693131	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN</b>													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	0	24.060	0	0	0	0	0	0	0	75.940	291.918	391.918
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	0	24.060	0	0	0	0	0	0	0	75.940	291.918	391.918
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	0	0	24.060	0	0	0	0	0	0	0	75.940	291.918	391.918
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	24.060	0	0	0	0	0	0	0	75.940	291.918	391.918

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025  
IV A. B L O K I R**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [693131] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693131	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN</b>		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.450
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 291.918		Efisiensi Belanja K/L T.A. 2025
	52 Belanja Barang Rp. 291.918		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.12.WA 7143	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
	<b>Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</b>		
7143.ABD	<b>Kebijakan Bidang Hukum dan HAM</b>		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.375		
	Efisiensi Belanja K/L T.A. 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.300		
	Efisiensi Belanja K/L T.A. 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 196.923		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.920		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.950		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7143.AEF	<b>Sosialisasi dan Diseminasi</b>		
	521211 Belanja Bahan(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693131/2025  
IV B. C A T A T A N**



DS:7348-9489-6606-0607

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM  
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN  
Kode dan Nama Satker : [693131] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.  
Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001